

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Hari jadi Kabupaten Tulungagung bertepatan pada tanggal 1 April 1824 Masehi. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Secara administrasi Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi 19 kecamatan dan 271 kelurahan atau desa. Berikut pembagian wilayah Kabupaten Tulungagung :

- 1) Kecamatan Bandung
- 2) Kecamatan Besuki
- 3) Kecamatan Boyolangu
- 4) Kecamatan Campur Darat
- 5) Kecamatan Gondang
- 6) Kecamatan Kalidawir
- 7) Kecamatan Karang Rejo
- 8) Kecamatan Kedung Waru
- 9) Kecamatan Ngantru
- 10) Kecamatan Ngunut
- 11) Kecamatan Pagerwojo
- 12) Kecamatan Pakel
- 13) Kecamatan Pucanglaban

- 14) Kecamatan Rejotangan
- 15) Kecamatan Sendang
- 16) Kecamatan Sumbergempol
- 17) Kecamatan Tulungagung

a. Kondisi Geografis Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung sebagian wilayahnya berada di dataran rendah, dan sebagian lagi berada di dataran tinggi. Untuk wilayah yang datarannya tinggi pada umumnya terletak di Tulungagung bagian Barat dan bagian Selatan, misalnya di bagian Barat ada Kecamatan Sendang, dan Pagerwojo. Di bagian Selatan ada Pucanglaban, Tanggunggunung, Campurdarat, dan Besuki. Di bagian Selatan inilah salah satu penghasil marmer dan batu onix, sehingga dijuluki sebagai Kota Marmer Tulungagung Bersinar, Kota Mandiri di Jawa Timur. Sedangkan untuk wilayah yang datarannya rendah umumnya terletak di sekitar Pusat Kota dan kecamatan-kecamatan disekitarnya. Konon dahulu kala setiap saat wilayah dibagian ini selalu tergenang air dan banyak ikan, apalagi jika ada hujan. Makanya di wilayah Tulungagung ini dulu disebut “Ngrowo”, istilah Jawa yang berarti rawa-rawa.

Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih 154 Km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Secara geografis wilayah Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat (1110431 – 1120 071) Bujur Timur (BT) dan (70 511 – 80 181) Lintang Selatan (LS) dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich Inggris. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung sebesar 113.167 ha sekitar 2,2% dari luas Propinsi Jawa Timur. Berbentuk

dataran yang subur pada bagian utara, tengah, dan timur, sebagian ada pegunungan dan samudra sepanjang batas selatan.

b. Visi dan Misi Kabupaten Tulungagung

1) Visi

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Dalam Suasana Kerukunan dan Kebersamaan Melalui Pembangunan DIHATIKU INGANDAYA"

Visi ini memiliki makna sebagai berikut :

Kesejahteraan masyarakat adalah merupakan tujuan akhir dari sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; Kerukunan dan kebersamaan adalah merupakan sifat utama serta modal dasar masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai secara konsisten dan berkesinambungan; Dihatiku Ingandaya adalah merupakan sebuah arah pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran terhadap potensi-potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Tulungagung.

2) Misi

- a) Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis dihatiku ingandaya dengan mendorong pertumbuhan investasi dan pemberdayaan potensi masyarakat;
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan sosial budaya melalui usaha pencapaian pembangunan manusia;

- c) Meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;
- d) Mewujudkan insan pembangunan yang beriman dan bertaqwa guna menjamin pencapaian masyarakat maju dan mandiri yang berkeadilan sosial;
- e) Meningkatkan derajat kehidupan politik yang demokratis, yang didukung oleh terpeliharanya ketertiban, ketentraman di masyarakat serta tegaknya supremasi hukum.

c. Lambang Kabupaten Tulungagung



Lambang daerah Kabupaten Tulungagung terlukis dalam sebuah dasar perisai berbentuk jantung bersudut 5 (lima) dan terbagi atas 6 (enam) warna yaitu:

- a. Putih : Kesucian
- b. Kuning : Kemasyuran
- c. Coklat : Kokoh
- d. Hijau : Kemakmuran

e. Hitam : Abadi

f. Biru Muda : Kesetiaan

Adapun makna lambang daerah Kabupaten Tulungagung terdiri dari 10 (sepuluh) bagian sebagai berikut:

1. Bentuk

Perisai berbentuk jantung bersudut 5 (lima) mengandung arti bahwa dalam segala perjuangan dan pembelaan daerah senantiasa berpijak pada prinsip lima dasar yaitu PANCASILA.

2. Tulungagung

- a. Sumber air yang besar (Tulung = sumber air, Agung = besar)
- b. Pertolongan yang besar (Tulung = pertolongan, Agung = besar)

3. Dasar

- a. Perisai berlancip 5

Bermakna dasar/falsafah Negara Republik Indonesia "Pancasila".

- b. Warna hitam dan kuning

Hitam melambangkan abadi dan kuning yang melambangkan kemasyuran, keduanya mencerminkan tekad didalam mengamalkan dasar falsafah Negara dengan disertai jiwa yang terkandung di dalam Pancasila secara murni dan konsekuen, demi tercapainya masyarakat tata tentrem kerto raharjo.

d. Topografi

Sekitar 13,35% dari daerah Kabupaten Tulungagung adalah daerah yang mempunyai ketinggian 85 m dpl (meter diatas permukaan laut).

Keadaan topografi dari wilayah ini menunjukkan ketinggian yang bervariasi sebagai berikut :

- a. Ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut □ 39.508,00 ha atau 36,87% dari luas wilayah kabupaten, terdapat hampir di semua kecamatan.
- b. Ketinggian 100 – 500 meter di atas permukaan laut □ 54.335,00 ha atau 51,94% dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Gondang, Pagerwojo, Kauman, Sendang, Karangrejo, Kalidawir, Tanggunggunung, Besuki, Pucanglaban, dan Boyolangu.
- c. Ketinggian 500 – 1.000 meter di atas permukaan laut meliputi wilayah seluas □ 9.325,00 ha atau 8,24 dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Pagerwojo, dan Kecamatan Sendang. Ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut □ 3.009,14 ha atau 2,95% dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang.

e. Geologi

Beberapa jenis tanah yang dapat dijumpai di wilayah Kabupaten Tulungagung, yaitu :

- a. Tanah Aluvial Coklat Kekelabuan terdapat di Kecamatan Bandung dan Besuki;
- b. Tanah Aluvial Coklat Tua kekelabuan terdapat di Kecamatan Besuki, Pakel, Campurdarat, Tulungagung, Boyolangu, Kalidawir, dan Pucanglaban;

- c. Tanah Asosiasi Aluvial Kelabu dan Aluvial Coklat Kekelabuan terdapat di Kecamatan Besuki, Bandung, Pakel, Campurdarat, Gondang, Boyolangu, Tulungagung, Kedungwaru, Ngantru, Sumbergempol, Kalidawir, dan Ngunut;
- d. Tanah Litosol terdapat di Kecamatan Bandung, Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir, dan Boyolangu;
- e. Tanah Litosol Mediteran dan Resina terdapat di Kecamatan Besuki, Tanggunggunung, Sumbergempol, Kalidawir, Pucanglaban, dan Rejotangan.
- f. Tanah Regosol Coklat Kekelabuan terdapat di Kecamatan Ngunut, Pucanglaban, dan Rejotangan.
- g. Tanah Mediteran Coklat Kemerahan terdapat di Kecamatan Bandung, Kauman, Karangrejo, Pagerwojo, dan Sendang.
- h. Tanah Litosol Coklat Kemerahan terdapat di Kecamatan Pagerwojo, dan Sendang.
- i. Tanah Andosol terdapat di Kecamatan Sendang dan Pagerwojo.

Dilihat dari jenis tanah yang ada serta hubungannya dengan penggunaan tanah, perlu diperhatikan sifat kimia dan fisika tanah setempat yang nantinya dapat dipergunakan untuk meningkatkan produksi tanah seoptimal mungkin. Tanah-tanah Litosol yang mendominasi wilayah bagian selatan Kabupaten Tulungagung meliputi Kecamatan Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir, dan Pucanglaban. Mempunyai kedalaman efektif tanah dangkal, kerana topografi yang bergelombang serta kemiringan tanah lebih dari 40%, maka pada daerah ini diharapkan ditanami dengan tanaman keras

yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sekaligus berfungsi sebagai tanaman pelindung dan zona perakaran untuk tata air. Tanah Litosol dengan bantuan induk kapur terdapat di Kecamatan Tunggugunung, Kalidawir, dan Pucanglaban mempunyai kedalaman efektif yang dangkal dan kandungan unsur hara yang miskin serta mempunyai kepekaan besar terhadap erosi. Untuk itu pengembangan hutan jati dan palawija perlu ditingkatkan di daerah ini.

f. Fisiologi

Apabila memperhatikan daerah fisiologi dapat digambarkan secara garis besar sebagai berikut :

1. Bagian utara (barat laut) seluas kurang lebih 25% adalah daerah lereng gunung yang relatif subur yang merupakan bagian tenggara dari gunung Wilis.
2. Bagian selatan seluas kurang lebih 40% adalah daerah perbukitan yang tandus, namun kaya akan potensi hutan dan tambang yang merupakan bagian dari pegunungan Jawa Timur.
3. Bagian tengah seluas kurang lebih 35% adalah dataran rendah yang subur, dimana dataran itu dilalui Sungai Brantas dan Sungai Ngrowo serta percabangannya.

g. Klimatologi

Iklim merupakan keadaan berbagai kondisi cuaca sehari-hari. Iklim suatu wilayah disusun oleh unsur-unsur yang variasinya besar sehingga hampir tidak mungkin dua tempat yang berbeda mempunyai iklim yang

sama. Secara garis besar Kabupaten Tulungagung mempunyai iklim tropis yang terbagi ke dalam dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim hujan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan musim kemarau (muson timur) yang jauh pada bulan April sampai dengan bulan September.

h. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung 1.055,65 km². Areal persawahan terdapat di bagian tengah wilayah Kabupaten Tulungagung. Adapun kecamatan-kecamatan yang mempunyai lahan dengan prosentase terhadap wilayahnya relatif besar adalah Kecamatan Bandung, Pakel, Karangrejo, dan Ngantru. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor pendukung yakni kondisi fisik dimana topografi daerah relatif datar (0% - 15%) dan terdapatnya aliran sungai dan sarana pengairan disamping kondisi geologi yakni keadaan tanah dengan jenis Aluvial yang banyak tersebar di sepanjang aliran sungai. Aluvial perkebunan dapat di jumpai pada Kecamatan Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Gondang, Karangrejo, Pegerwojo, dan Sendang. Sedangkan kawasan hutan terdapat hampir di seluruh wilayah kecuali Kecamatan Pakel, Tulungagung, Kedungwaru, dan Kecamatan Ngantru dengan luas areal terbesar di Kecamatan Tanggunggunung dan Kecamatan Pegerwojo. Adapun kawasan prioritas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok.

i. Potensi Unggulan

Wilayah ini merupakan dataran rendah dengan kondisi umum lebih baik dari kawasan lain sehingga pelaksanaan kegiatan kawasan ini lebih bersifat peningkatan, misalnya : peningkatan pemanfaatan lahan, peningkatan usaha tani, peningkatan fungsi kelembagaan, peningkatan kualitas produksi, peningkatan mutu intensifikasi, dan lain-lain.

2. Gambaran Umum Lokasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung

Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung terletak di Jalan Ahmad Yani Timur Gang 4 No 7 Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Lokasi kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung cukup strategis karena berdekatan dengan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang hanya berjarak sekitar 1 km. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sebelum memiliki struktur organisasi berupa Badan tersendiri, BKD Kabupaten Tulungagung pada mulanya merupakan Bagian Kepegawaian yang memiliki garis struktur organisasi di bawah Sekretariat Daerah. Struktur organisasi tersebut berlangsung hingga pada tahun 2000 yang kemudian berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Struktur organisasi

BKD Kabupaten Tulungagung mulai dari awal pembentukan hingga saat ini telah mengalami dua kali perubahan. Struktur yang terakhir adalah sesuai dengan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan kedudukannya, Badan Kepegawaian Daerah memiliki fungsi perumus kebijaksanaan teknis di bidang kepegawaian serta memberikan layanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang manajemen Kepegawaian Daerah.

a. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Tulungagung

1) Visi :

“Terbangunnya Pegawai Negeri Sipil yang Profesional dan Bermartabat”.

2) Misi :

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan di atas, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung menjabarkan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung guna mewujudkan visi di atas, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian.
2. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

3. Mengembangkan sitem manajemen informasi kepegawaian berbasis IPTEK.

b. Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Tulungagung

Tabel 2 : Jumlah PNS Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016

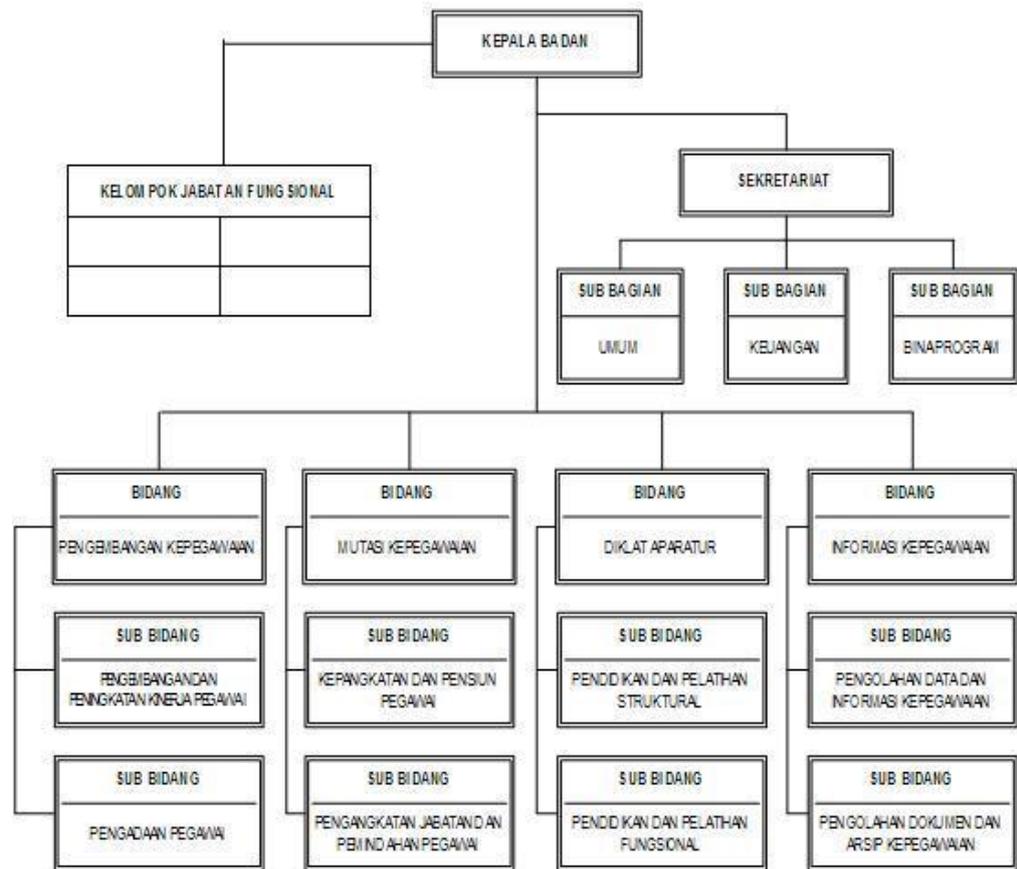
No.	Tingkat Pendidikan	Satuan	2016
1.	Magister (S-2)	Orang	6
2.	Sarjana (S-1)	Orang	19
3.	Diploma (D-IV)	Orang	1
4.	Diploma (D-III)	Orang	5
5.	SLTA	Orang	4
6.	SMEA	Orang	2
7.	SMA	Orang	6
8.	SD	Orang	1
	Jumlah		44

Sumber : Dokumen Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tulungagung, 2016

c. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Kabupaten Tulungagung

Struktur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung terdiri atas:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat
- 3) Bidang Pengembangan Kepegawaian
- 4) Bidang Mutasi Kepegawaian
- 5) Bidang Diklat Aparatur
- 6) Bidang Informasi Kepegawaian



Gambar 9 : Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kab.

Tulungagung

Sumber: bkd.tulungagung.go.id

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Susunan organisasi dan tata kerja BKD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Secara garis besar unsur-unsur yang harus ada menurut Keputusan Presiden RI Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan BKD antara lain Kepala, Sekretariat, Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan organisasi BKD Kabupaten Tulungagung yang diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung terdiri dari :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Badan, penyusunan program dan perencanaan Badan serta pembinaan hukum, sumber daya manusia, organisasi dan tatalaksana badan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengerjakan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan, rumah tangga;
- b. Melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
- c. Memfasilitasi proses cuti PNS;

- d. Menyiapkan pengangkatan Plh (pelaksana harian) dan Plt (pelaksana tugas);
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang hubungan masyarakat;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksana tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan tata usaha dan administrasi keuangan danperlengkapan;
- b. Menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukanadministrasibarang;
- c. Melakukan pembayaran gaji pegawai;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan dan program kegiatan kepegawaian;
- b. Menyusun penetapan kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA);

- c. Menyusun LAKIP, LKPJ dan laporan akhir kegiatan;
- d. Membuat surat pemberitahuan LP2P dan mengkoordinir pengiriman LP2P dan LHKPN;
- e. Menyusun LPPD, IKK, dan EKPPD;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Bidang Pengembangan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan peningkatan kinerja pegawai serta pengadaan pegawai. Bidang Pengembangan Kepegawaian memiliki fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kepegawaian;
- b. Perencanaan kebutuhan PNS;
- c. Pengadaan dan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan sumpah/janji PNS;
- e. Melakukan penjatuhan sanksi PNS;
- f. Pembinaan jabatan fungsional tertentu;
- g. memfasilitasi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Bidang Pengembangan kepegawaian membawahi:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memproses bahan penyusunan dan perumusan petunjuk peningkatan kinerja pegawai;
 - b. Melakukan pemeliharaan dokumen dan memfasilitasi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - c. Memfasilitasi proses izin perceraian;
 - d. Memproses penjatuhan sanksi PNS;
 - e. Memproses pengangkatan, pembebasan dan pemberhentian jabatan fungsional tertentu;
 - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
 - g. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
2. Sub Bidang Pengadaan Pegawai, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan pengadaan pegawai;
 - b. Memproses bahan penyusunan formasi pegawai;
 - c. Memproses pengangkatan CPNS menjadi PNS;
 - d. Memproses rekomendasi tenaga Non PNS;
 - e. Menyiapkan pelaksanaan sumpah/ janji PNS;
 - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - g. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 4) Bidang Mutasi Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang kepangkatan dan pensiun pegawai serta pengangkatan jabatan dan pemindahan pegawai. Bidang Mutasi kepegawaian memiliki fungsi antara lain:
- a. Perumusan kebijakan teknis mutasi dan pemberhentian PNS;

- b. Perencanaan pengangkatan/pemindahan dalam jabatan struktural atau yang setara dan pemindahan PNS;
- c. Pelaksanaan kenaikan pangkat, penetapan gaji, pemberhentian dan pensiun PNS;
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Mutasi kepegawaian membawahi:

1. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun Pegawai, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan dan memproses pelaksanaan kenaikan pangkat PNS;
 - b. Menyiapkan pelaksanaan kenaikan gaji berkala PNS;
 - c. Memproses tambahan masa kerja PNS;
 - d. Menyiapkan pelaksanaan pemberhentian dan pensiun PNS;
 - e. Melakukan penyesuaian gaji/impasing PNS;
 - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Sub Bidang Pengangkatan Jabatan dan Pemindahan Pegawai, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan proses pengangkatan dan/atau pemindahan PNS dalam jabatan;
 - b. Menyiapkan dan melaksanakan pemindahan PNS antar instansi dan antar wilayah;

- c. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan;
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 5) Bidang Diklat Aparatur, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional. Untuk melaksanakan tugas, Bidang pendidikan dan pelatihan Aparatur mempunyai fungsi antara lain :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penyusunan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, evaluasi dan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pembinaan, koordinasi dan konsultasi program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur;
 - d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur;
 - e. Pelaksanaan evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan;
 - f. Penyusunan program penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah PNS;
 - g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
 - h. Pembinaan tenaga pengajar, peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan;
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang pendidikan dan pelatihan aparatur, membawahi:

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun analisa kebutuhan diklat kepemimpinan, CPNS, Anggota DPRD, Kepala Desa dan Anggota BadanPemusyawaratan Desa;
 - b. Menyelenggarakan dan memfasilitasi diklat kepemimpinan dan CPNS;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran diklat kepemimpinan dan diklat CPNS;
 - d. Pendampingan bagi peserta diklat pimpinan yang mengalami kesulitan pembelajaran;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi diklat kepemimpinan;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil diklat;
 - g. Memfasilitasi pengembangan dalam jabatan;
 - h. Melakukan upaya guna peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan kedinasan;
 - i. Memfasilitasi diklat yang diperuntukan bagi Kepala Daerah/ Wakil kepala Daerah;
 - j. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan diklat teknis dan fungsional;
 - b. Melakukan analisis kebutuhan diklat teknis dan fungsional;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran diklat teknis dan diklat fungsional;
 - d. Menyelenggarakan dan memfasilitasi diklat teknis dan fungsional;
 - e. Pendampingan bagi peserta diklat teknis dan fungsional;
 - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi diklat teknis dan fungsional;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil diklat teknis dan fungsional;
 - h. Melaksanakan peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan umum;
 - i. Menyelenggarakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah pns;
 - j. Memproses administrasi tugas belajar dan ijin belajar;
 - k. Melaksanakan dan memfasilitasi diklat yang diperuntukan bagi kepala desa, perangkat desa, dan sekretaris desa;
 - l. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- 6) Bidang Informasi Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengolahan data dan informasi/karier kepegawaian serta pengolahan dokumen dan arsip kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas Bidang Informasi kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang informasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan pengumpulan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- c. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi kepegawaian;
- d. Pengembangan penyajian informasi data kepegawaian;
- e. Penyebaran informasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi dalam pengolahan data kepegawaian;
- g. Pelaksanaan pengusulan dan pengurusan dokumen kepegawaian;
- h. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban bidang informasi kepegawaian;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Bidang Informasi kepegawaian, membawahi:

1. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan mengelola program aplikasi jaringan Sistem pegawai Online (SIPO) dan perangkat keras jaringan komputer / internet;
 - b. Menyajikan informasi kebijakan dibidang kepegawaian;
 - c. Melakukan update data kepegawaian;
 - d. Melakukan koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronasi data kepegawaian;

- e. Menyusun dan menyiapkan daftar urut kepangkatan (DUK) PNS;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

d. Tugas dan Fungsi badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung

Badan Kepegawaian Daerah memiliki fungsi perumus kebijaksanaan teknis di bidang kepegawaian serta memberikan layanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang manajemen Kepegawaian Daerah. Dalam melaksanakan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan nama prosedur yang ditetapkan pemerintah;
2. Melaksanakan dan pengembangan Kepegawaian Daerah;
3. Menyiapkan kebijaksanaan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah;
4. Menyiapkan dan melaksanakan pengangkatan kenaikan pangkat, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Melayani administrasi kepegawaian dalam pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan nama, standar dan

- prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menyiapkan dan melaksanakan penetapan pensiun PNS Daerah sesuai dengan nama, standar dan prosedur dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Menyelenggarakan administrasi PNS Daerah;
 8. Mengelola sistem informasi Kepegawaian Daerah;
 9. Menyampaikan informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara;
 10. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS Daerah dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
 11. Melaksanakan seleksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. Implementasi Program Sistem Informasi Pegawai *Online* (SIPO) dalam mewujudkan *E-Government*

Model implementasi program Sistem Informasi Pegawai Online (SIPO) dalam mewujudkan E-government ini menggunakan model Charles O. Jones yang dikutip Usman (2002:28) yang terdiri dari pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan. Penyajian datanya sebagai berikut :

a) Pengorganisasian

Suatu kegiatan dalam sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik dengan adanya beberapa elemen yang menggerakkan, mengatur, dan mengevaluasi

rencana dari tujuan akhir kegiatan tersebut. Dan keberhasilan organisasi juga ditunjang oleh beberapa sumberdaya antara lain, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana, dan sumberdaya anggaran.

Sumberdaya manusia yang terlibat dalam implementasi program ini yaitu Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Pegawai Negeri Sipil (sebagai operator program SIPO dan juga sebagai penerima pelayanan kepegawaian) dan swasta (perusahaan yang mengikuti pengadaan barang dan jasa). Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada seluruh Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai pelaksana program sekaligus penerima layanan dari program SIPO. Oleh karena itu PNS berperan penting dalam keberhasilan program ini, karena program SIPO ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian yang lebih baik dan lebih cepat juga mendorong penggunaan Sistem Informasi kepegawaian untuk setiap layanan kepegawaian. SIPO juga memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam mendukung proses pelayanan dan pengambilan keputusan di bidang manajemen kepegawaian.

Bersadarkan hasil wawancara dengan Bapak Lutfi selaku kepala sub bidang pengolahan data dan admin pusat SIPO Badan kepegawaian daerah pada tanggal 12 Juni 2017 di kantor BKD yaitu :

“Operator seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan UPTD lingkup Pemerintah kabupaten Tulungagung sangat berperan penting dalam program SIPO ini. Oleh karena itu setelah mendapat dukungan yang baik dari seluruh operator SIPO, SIPO semakin berkembang dari tahun ke tahun. Setiap tahun juga ada sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan untuk seluruh pengguna SIPO yang ada di BKD sendiri, OPD dan UPTD serta Kasubag yang menangani kepegawaian yang diadakan oleh BKD. Untuk tahun 2017 ini saja sudah tiga kali mengadakan pertemuan rutin yang membahas tentang pengembangan SIPO”.

Selanjutnya untuk menunjang keberhasilan dari program SIPO, operator yang dipilih juga mempunyai ketentuan dan standar yang harus dipenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lutfi selaku kepala sub bidang pengolahan data BKD pada tanggal 12 Juni 2017 di kantor BKD yaitu :

“ Dalam memilih operator SIPO, BKD juga mempunyai syarat-syarat antara lain, pegawai yang menguasai IPTEK dan Internet, kedua yang membidangi kepegawaian. Khusus BKD semua pegawai bisa menjadi operator SIPO”.

Kemudian sumberdaya peralatan sarana dan prasarana, yaitu sebuah media untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Karena sumberdaya manusia saja tidak cukup dan suatu program tidak dapat berjalan dengan sempurna. Dalam program SIPO ini Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan fasilitas berupa peralatan dan material ke setiap OPD dan UPTD untuk menunjang program SIPO. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lutfi selaku kepala sub bidang pengolahan data BKD pada tanggal 12 Juni 2017 di kantor BKD menyatakan bahwa :

“Setiap Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan UPTD sudah tersedia fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan program SIPO seperti jumlah Komputer PC, notebook, printer, scanner, server lokal, dan koneksi internet”.

Selain itu sumber daya anggaran juga merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan program SIPO ini. Anggaran yang cukup akan menjadi dorongan utama keberhasilan pelaksanaan program SIPO pada BKD ini yaitu dari APBD. Sehingga BKD tinggal melaksanakan dan terus mengembangkan program ini dari anggaran yang tersedia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lutfi selaku kepala sub bidang pengolahan data dan admin pusat SIPO Badan kepegawaian daerah pada tanggal 11 Juli 2017 di kantor BKD yaitu :

“Sumberdaya anggaran sudah ada di APBD Kabupaten Tulungagung. Sepenuhnya sumber pendanaan berasal dari APBD Tulungagung, sehingga BKD ini tinggal menjalankan saja. Sejak perencanaan program SIPO sampai tahap sekarang ini peningkatan kualitas manajemen informasi berbasis IPTEK sudah siap dananya. Misalnya digunakan untuk belanja modal perangkat lunak (software) mbak”.

Jadi sumber daya manusia yaitu seluruh operator SIPO sangat mendukung dan merespon dengan baik pelaksanaan SIPO ini. Dapat dilihat dari respon positifnya saat mengikuti sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan yang dilaksanakan di BKD. Selanjutnya sumberdaya peralatan sarana dan prasarana juga sudah terfasilitasi di masing-masing OPD hal ini juga didukung dengan sumberdaya anggaran dimana pendanaan program SIPO sepenuhnya berasal dari APBD Kabupaten Tulungagung sehingga BKD tinggal menjalankan programnya kemudian disalurkan kesemua OPD lingkup Kabupaten Tulungagung.

b. Interpretasi

Interpretasi diartikan sebagai sebuah proses komunikasi dan tindakan dari para pelaksana program untuk menjalankan sebuah programnya sesuai dengan tujuan yang akan dicapainya. Proses pelaksanaan program SIPO di BKD terlihat baik, terlihat dari respon positif dari para operator SIPO Kabupaten Tulungagung dalam melihat adanya banyak manfaat dari program ini. Para Admin SIPO dan Operator SIPO seluruh OPD dan UPTD Kabupaten Tulungagung sangat antusias untuk terus belajar perlahan-lahan untuk mengikuti perkembangan dari SIPO yang selama ini terus berupaya memperbaiki dan mengembangkan aplikasi SIPO tersebut menjadi sistem yang lebih bisa mencakup semua kebutuhan. Hal ini untuk mewujudkan kebutuhan data dan layanan kepegawaian yang lebih baik dan

lebih cepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Toni Hartanto selaku operator SIPO dari Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung pada tanggal 11 Juli 2017 di kantor BKD menyatakan bahwa :

“Memang setelah adanya program SIPO ini sangat membantu kita mbak untuk pengolahan data pegawai di KPU, misal dalam hal kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, dll. Sehingga kalau online gini kita mengelolanya lebih cepat daripada manual ribet prosesnya kita harus riwa-riwi ke BKD. Jika kita ada kesulitan dalam menginput data juga bisa langsung mengonsultasikan ke admin pusat di BKD melalui group operator SIPO di WhatsApp, jadi kita juga sangat senang dengan adanya program SIPO ini dan sangat semangat sekali apabila mengikuti sosialisasi dan pelatihan dalam upaya pengembangan SIPO ke arah yang lebih baik lagi yang dilakukan oleh BKD”.

Keberhasilan suatu program tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak ada dukungan dan komunikasi yang baik antar pelaksana program. Sehingga dalam mewujudkan suatu tujuan dari program SIPO ini sangat dibutuhkan kerja sama yang baik. Mengingat dalam memilih dan menggerakkan operator SIPO ini juga tidak mudah maka BKD harus mampu menatanya dengan baik dan disesuaikan dengan segala kompetensi yang dimiliki oleh operator SIPO. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ivan selaku operator SIPO dari BKD pada tanggal 11 Juli 2017 di kantor BKD juga menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan program SIPO ini sudah bagus, karena membantu sekali terutama dalam hal kebutuhan informasi data PNS. SIPO dapat dikatakan cukup sesuai dengan kebutuhan pegawai. Sebagai contoh PNS dipermudah dalam urusan kepegawaian seperti pengajuan cuti bisa online melalui SIPO, urusan kelengkapan berkas dalam pengurusan dokumen kepegawaian jadi lebih efisien karena mengaksesnya pun lebih cepat berupa file di komputer atau yang tersimpan di database, kita tidak lagi membuka berkas-berkas yang menumpuk. Misal kita membutuhkan informasi berapa jumlah data pegawai yang sudah golongan III A atau III B kalau

kita tidak memiliki datanya yang tersimpan di komputer maka kita harus membuka berkas-berkas fisik, jadi butuh proses yang lama”.

Berdasarkan kutipan diatas maka pelaksanaan program SIPO di BKD Kabupaten Tulungagung mempermudah dalam proses pengumpulan, pendokumentasian dan penggunaan serta pengolahan data pegawai. Dalam sebuah organisasi Pegawai memiliki peranan penting maka sebuah data tentang pegawai pun harus lengkap, akurat dan tepat yang nantinya akan digunakan dengan cepat dalam pengambilan keputusan tentang kepegawaian. BKD juga dituntut untuk menata dan menempatkan PNS sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerjanya sehingga penataan dan penempatan tersebut membutuhkan data dan sistem informasi kepegawaian yang lebih lengkap dan kompleks. Hal ini juga dikarenakan dukungan dan kesadaran dari semua pelaksana program yaitu seluruh pengguna SIPO dan operator SIPO bahwa pentingnya untuk melakukan sebuah perubahan birokrasi meskipun membutuhkan sebuah proses yang panjang serta dukungan dari pemerintah membuat para pelaksana program untuk terus semangat melaksanakan program SIPO ini dengan baik untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian di Kabupaten Tulungagung yang lebih baik dan lebih cepat.

c) Penerapan/pelaksanaan

Hasil dari pelaksanaan program SIPO ini dengan disusunnya program integrasi data kepegawaian antara pusat (BKN) dan instansi terkait, membutuhkan penyesuaian struktur database dan sistem informasi kepegawaian yang ada di daerah yang mana akan memenuhi kebutuhan

data memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih baik dan lebih cepat juga mendorong penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian untuk setiap layanan kepegawaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lulut Rahayu selaku operator SIPO di Bagian Umum Setda Kabupaten Tulungagung pada tanggal 11 Juli 2017 di Kantor BKD Kabupaten Tulungagung yaitu :

“Konsep menu atau fitur-fitur di SIPO ini sudah lengkap sesuai kebutuhan data pegawai. Kita tinggal klik saja apa yang kita butuhkan dan sangat membantu operator atau seperti saya ini yang menangani bidang kepegawaian di bagian umum. SIPO saat ini juga sudah berkembang dan semakin maju untuk berusaha terus me-upgrade sesuai tuntutan kebutuhan pegawai yang mana juga tuntutan dari BKN”.

Dalam mendukung peran dan fungsi strategis yang dimiliki SIPO, aplikasi online SIPO saat ini telah mengalami berbagai pengembangan dan perbaikan pada modul dan fitur-fiturnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lutfi selaku kepala sub bidang pengolahan data BKD pada tanggal 12 Juni 2017 di kantor BKD yaitu :

“Perkembangan SIPO dari tahun ke tahun semakin baik, semakin kompleks dan lebih banyak penggunaannya serta fitur-fiturnya ada yang baru. Untuk pengembangan dan rencana kedepannya akan ada fitur atau layanan pensiun secara otomatis dan sinkronasi data juga akan ditambahkan”.

Badan Kepegawaian daerah kabupaten Tulungagung menggunakan sistem informasi PNS secara online (SIPO) yang terus menerus dikembangkan dengan menu dan fitur-fitur khusus didalamnya yang dirasakan sangat besar manfaatnya dalam membantu operator dalam mengolah data pegawai yang ada di instansi-instansi lingkup pemerintah

kabupaten Tulunggaung ini, juga membantu tugas pegawai yang berkepentingan dalam pengurusan kepegawaian sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan terkait recruitment pegawai, penempatan pegawai yang sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya, pengembangan pegawai, dan kesejahteraan pegawai. Berikut merupakan tampilan menu log in SIPO yang diterapkan di Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Tulungagung.

Menu Log in SIPO



Gambar 10 : Tampilan menu log-In

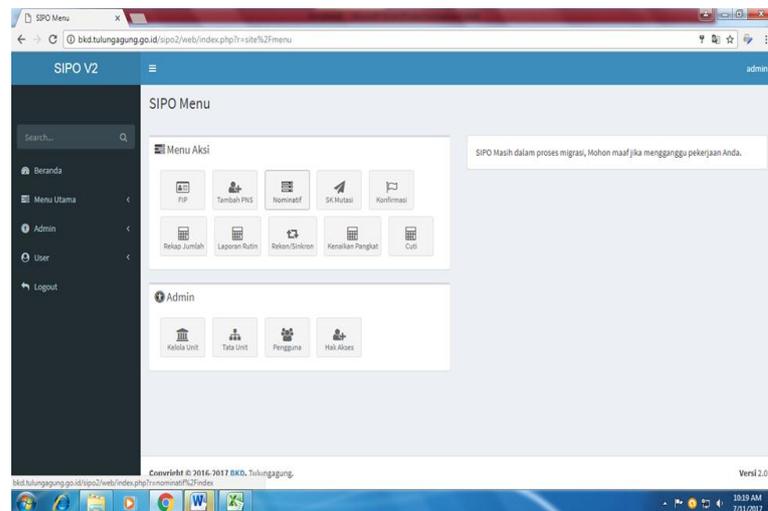
(Sumber : Badan Kepegawaian daerah kabupaten Tulungagung, 2017)

Untuk memulai mengoperasikan aplikasi harus log in terlebih dahulu seperti gambar diatas. Sebagai salah satu contoh yang dialami peneliti saat mencoba secara langsung log in SIPO dengan dipandu oleh operator bagian sekretariat di kantor BKD. Dengan memasukkan “Username” dan “Password” pada kolom yang tersedia lalu klik tombol “Login”. Jadi setiap operator SIPO sudah mempunyai username dan password masing-masing dan khusus untuk bisa memulai

mengoperasionalkan SIPO dalam proses kepegawaian. Proses kepegawaian yang akan dibahas disini antara lain :

1. Tampilan Data pegawai

Tampilan data pegawai merupakan proses kepegawaian yang mana fiturnya menampilkan data identitas pegawai pada suatu instansi terkait.



Gambar 11 : Tampilan menu utama pada SIPO

(Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung, 2017)

Selanjutnya jika login berhasil maka setiap operator atau users akan masuk pada menu utama seperti gambar diatas. Dengan beberapa macam fitur aplikasi antara lain :

- a) Biodata, untuk entri dan pemutakhiran data PNS
- b) Nominatif, menampilkan data PNS sesuai dengan unit kerja atau kriteria yang ditentukan
- c) Jumlah, menampilkan jumlah/statistik PNS dengan kategori tertentu
- d) Penjagaan, menampilkan daftar perkiraan kenaikan pangkat, gaji berkala dan perkiraan pensiun PNS

pribadi, data suami istri, anak, riwayat pegawai, kepangkatan, unit kerja, alamat dan kontak, status, jabatan, dan lain sebagainya.

2. Mengubah atau Mengedit Biodata Pegawai dan Daftar Riwayat Hidup
Untuk penggunaan biodata pegawai dan daftar riwayat hidup terdapat petunjuk untuk mengubah atau mengeditnya. Misalnya akan mengubah data pribadi yang meliputi data NIP, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, agama dan status perkawinan. Langkah-langkah untuk mengubah data pribadi sebagai berikut :

- a) Pilih salah satu pegawai yang datanya akan dirubah, lalu klik tombol “ubah” di area wilayah pribadi
- b) Jika sudah tampil form perubahan data pribadi isikan data yang diinginkan pada kolom isian yang bersesuaian
- c) Jika yakin data sudah benar klik tombol “ Simpan”
- d) Jika ingin membantalkan klik tombol “Batalkan”

Gambar 13 : Tampilan mengubah biodata pegawai

(Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung, 2017)

Sedangkan untuk mengedit daftar riwayat hidup klik saja riwayat kemudian pilih riwayat apa yang akan diedit. Riwayat dalam fitur ini antara lain riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat pangkat, riwayat diklat pimpinan, riwayat diklat fungsional, riwayat diklat teknis, riwayat bimtek/kursus, dan riwayat keluarga. Misalnya akan mengedit riwayat pangkat klik riwayat tersebut lalu isikan semua datanya. Jika selesai klik simpan untuk menyimpan datanya. Apabila ingin mencetak biodata pegawai dan riwayat yang dibutuhkan klik “cetak” di riwayat tersebut.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://bid.tulungagung.go.id/ipo/index.php/print/biodata/pns/15540>. The page has a yellow background and a navigation bar with 'Beranda', 'Menu Utama', and 'Biodata'. Below the navigation bar is a search section titled 'Kriteria Pencarian' with buttons for 'Cari', 'Cari', 'Cari', and 'Cari'. The main content area is divided into several sections, each with a 'Ubah' button:

- DATA PRIBADI DAN DATA**: Includes fields for 'Riwayat' (with a dropdown menu), 'NP LAMA', 'NP BARU', 'R. Pendidikan', 'R. Diklat Pimpinan', 'R. Diklat Fungsional', 'R. Diklat Teknis', 'R. Bimtek/Kursus', 'R. Keluarga', 'Cetakan', and 'STATUS PERAWAHAN'.
- ALAMAT DAN KONTAK**: Includes fields for 'ALAMAT', 'PROVINSI', 'KABUPATEN', 'KECABUPATEN', 'KODE POS', 'TELP', and 'HP'.
- KEPANGKATAN**: Includes fields for 'GOL CPNS (TMT CPNS)', 'TMT PNS', 'GOL TERAKHIR (TMT GOL)', 'WASA KERJA', 'TMT BERKALA', and 'WASA KERJA BERKALA'.
- STATUS**: Includes fields for 'KEJADWALAN HUKUM', 'STATUS KEPERAWAHAN', 'JENIS PERAWAHAN', 'PERUSAHAAN KP', 'PERUSAHAAN BERKALA', and 'PERUSAHAAN PERISIAN'.
- UNIT KERJA**: Includes fields for 'INSTANSI INDIK', 'SATUAN UNIT KERJA', and 'DINAS KESEHATAN'.
- JABATAN**: Includes fields for 'JENIS JABATAN' and 'JABATAN'.

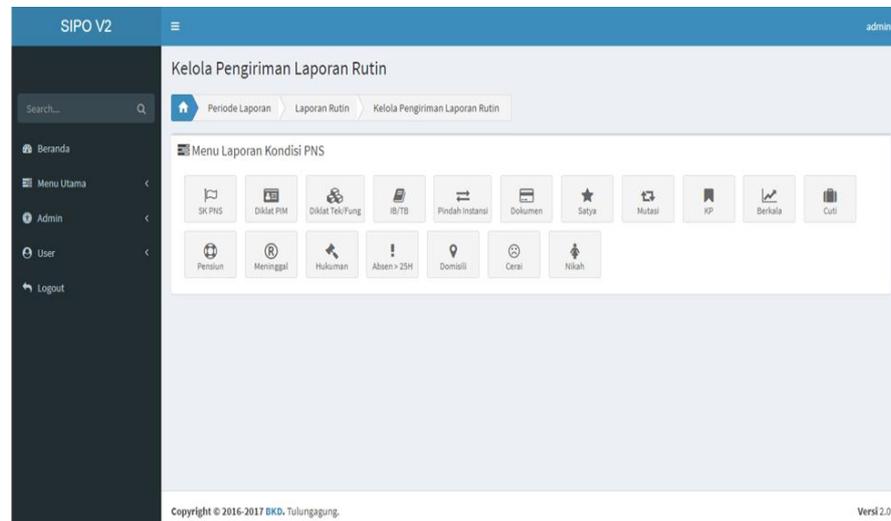
Gambar 14. Tampilan mengubah riwayat hidup pegawai

(Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung, 2017)

3. Pengelolaan Laporan Rutin Triwulan

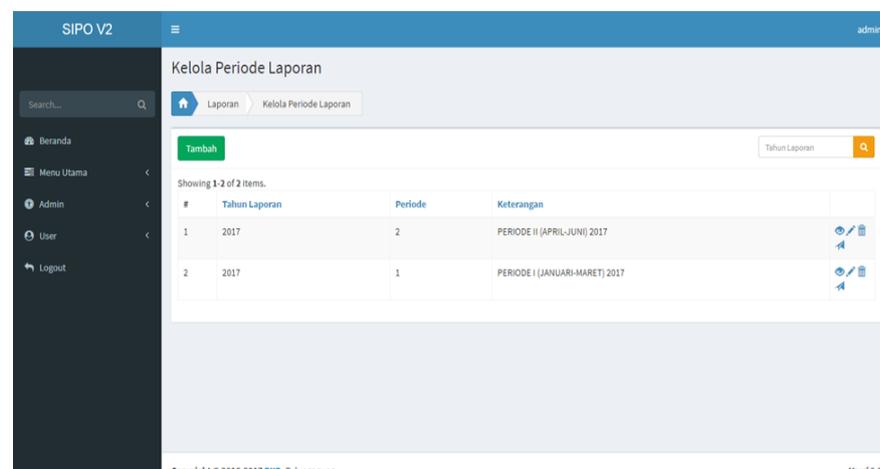
Penerapan program SIPO juga digunakan dalam mengelola laporan rutin triwulan masing-masing OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang dilaporkan pada BKD yaitu laporan kondisi PNS antara lain : pensiun, kenaikan pangkat, gaji berkala, absensi PNS, mutasi, Tugas Belajar PNS, dll. Jadi tugas

operator SIPO selain mengelola data kepegawaian dalam bentuk online juga melaporkan hasil data PNS dalam bentuk print out ke BKD setiap tiga bulan sekali dan tugas BKD untuk mengeceknya.



Gambar 15 : Tampilan Menu laporan Kondisi PNS

(Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung, 2017)



Gambar 16 : Tampilan Kelola Periode Laporan Triwulan

(Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung, 2017)

#	NIP	Nama PNS	Jenis KP	Gol Ruang	TMT.KP	STATUS
1	197907122009011007	YUDITH IRFAN SUTANTO	Reguler	III/c	01-04-2017	👁️ 🗑️ 📄
2	197909132009012008	ENI WAHYUNINGSIH	Reguler	III/c	01-04-2017	👁️ 🗑️ 📄
3	197805032009012003	ETI SULISTIANI	Reguler	III/c	01-04-2017	👁️ 🗑️ 📄
4	19670301986681001	JAENAL MUARIEF	Reguler	III/b	01-04-2017	👁️ 🗑️ 📄
5	196305052009011002	MARDANI	Reguler	II/c	01-04-2017	👁️ 🗑️ 📄
6	196505192009011003	ARIES PRASETYO	Reguler	III/a	01-04-2017	👁️ 🗑️ 📄
7	196306132009011001	YUSWANTO	Reguler	II/c	01-04-2017	👁️ 🗑️ 📄
8	196309282009011001	BAMBANG TRENGGONO	Reguler	II/c	01-04-2017	👁️ 🗑️ 📄
9	196505122009011001	WASKITO	Reguler	II/c	01-04-2017	👁️ 🗑️ 📄
10	196505232009011002	SURAJI	Reguler	II/c	01-04-2017	👁️ 🗑️ 📄

NIP	197907122009011007
Nama PNS	YUDITH IRFAN SUTANTO
Jenis KP	Reguler
Gol Ruang	III/c
TMT.KP	01-04-2017
Nomor Pertimbangan BKN	(not set)
Tanggal Pertimbangan BKN	(not set)
Nomor SK	823/65/203/2017
Tanggal SK	30-03-2017
Masa Kerja Tahun	13
Masa Kerja Bulan	03
Pejabat Penetap	BUPATI TULLUNGAGUNG
Keterangan	-

Gambar 17 : Tampilan Laporan SK Kenaikan Pangkat PNS

(Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung, 2017)

#	NO SK	Tgl. Pelantikan	TMT Mutasi	Instansi	Pejabat Penetap	Keterangan	Status
1	821.2/120/203/2017	31-05-2017	02-06-2017	PEMKAB. TULLUNGAGUNG	BUPATI TULLUNGAGUNG	PELANTIKAN JUNI 2017	👁️ 🗑️ 📄
2	824/12/203/2017	27-01-2017	27-01-2017	PEMKAB. TULLUNGAGUNG	BUPATI TULLUNGAGUNG	MUTASI STAFF	👁️ 🗑️ 📄
3	824/11/203/2017	24-01-2017	24-01-2017	PEMKAB. TULLUNGAGUNG	BUPATI TULLUNGAGUNG	MUTASI SUSULAN OPD	👁️ 🗑️ 📄
4	821.2/3/203/2017	12-01-2017	06-01-2017	PEMKAB. TULLUNGAGUNG	BUPATI TULLUNGAGUNG	MUTASI ESELON IV NO 610 s.d 711	✅ 🗑️ 📄
5	821.2/3/203/2017	12-01-2017	06-01-2017	PEMKAB. TULLUNGAGUNG	BUPATI TULLUNGAGUNG	MUTASI ESELON IV NO 209 s.d 308	✅ 🗑️ 📄
6	821.2/3/203/2017	12-01-2017	06-01-2017	PEMKAB. TULLUNGAGUNG	BUPATI TULLUNGAGUNG	MUTASI ESELON IV NO 403 s.d 505	✅ 🗑️ 📄
7	821.2/3/203/2017	12-01-2017	06-01-2017	PEMKAB. TULLUNGAGUNG	BUPATI TULLUNGAGUNG	MUTASI ESELON IV NO 309 s.d 402	✅ 🗑️ 📄

Gambar 18 : Tampilan Pengelolaan SK Mutasi PNS

(Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung, 2017)

2. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Program Sistem Informasi Pegawai *Online* (SIPO) dalam Mewujudkan *e-Government*

a. Faktor Pendukung

1) komputer PC

Komputer merupakan salah satu peralatan yang mendukung dalam pencapaian program SIPO. Perangkat pendukung ini dalam implementasi SIPO baik di Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Tulunggaung maupun di seluruh OPD lingkup Kabupaten Tulungagung jumlah komputernya cukup memadai untuk mendukung penggunaan sistem informasi yang terintegrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lutfi selaku kepala sub bidang pengolahan data BKD pada tanggal 12 Juni 2017 di kantor BKD yaitu :

“Jumlah Komputer PC sudah cukup mendukung dalam pelaksanaan SIPO. Hal ini dikarenakan peralatan sarana dan prasarana sudah difasilitasi dan dianggarkan dari dana APBD Kabupaten Tulungagung”.

Dari pernyataan diatas diungkapkan bahwa peralatan pendukung seperti komputer PC sudah terfasilitasi dengan baik sehingga pelaksanaan SIPO juga dapat berjalan dengan baik dan berhasil.

2)Adanya Bidang Khusus

Adanya bidang khusus yang menangani pengembangan sistem informasi kepegawaian yaitu Badan Kepegawaian Daerah khususnya bidang Informasi Kepegawaian yang saat ini terus memperbaiki dan mengembangkan SIPO untuk memenuhi kebutuhan data pegawai dan sistem layanan kepegawaian yang lebih luas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ivan selaku operator SIPO di BKD pada tanggal 11 Juli 2017 di kantor BKD yaitu :

“Salah satu faktor pendukung berjalannya program SIPO ini adanya Sumber Daya Manusia di BKD yang memumpuni untuk mengelola dan mengembangkan program SIPO ini. Seperti bidang INKA (Informasi Kepegawaian dan Dokumentasi Pengolahan Data Pegawai) di BKD yang merupakan kumpulan pegawai yang memiliki kompetensi dan ahli di bidang IPTEK”.

Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya bidang khusus seperti bidang INKA di BKD ini yang menunjang keberhasilan program SIPO dimana disesuaikan dengan SDM yang dimiliki untuk membidangi program tersebut. Bidang INKA sampai saat ini terus berupaya untuk me-upgrade SIPO menjadi sistem yang lebih bisa mencakup semua kebutuhan baik kebutuhan pegawai maupun sinkronasi database kepegawaian antara SIPO dengan BKN.

3) Dukungan Para Stakeholder

Menjalankan sebuah program tentu saja tidak mudah, dibutuhkan kerjasama, dukungan, maupun kesadaran dari pihak terkait. Dalam implementasi program SIPO dalam mewujudkan e-government di BKD ini juga didukung dengan kesadaran dari para stakeholder bahwa pentingnya sistem informasi yang terintegrasi guna mendukung pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lutfi selaku kepala sub bidang pengolahan data BKD pada tanggal 12 Juni 2017 di kantor BKD yaitu :

“Semua ini juga tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam pengembangan *e-Government* di semua sektor pemerintahan. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya data atau informasi kepegawaian yang up to date dan akurat. hal tersebut menimbulkan sikap kooperatif dari berbagai instansi untuk memberikan data kepegawaian sebagai bahan perbaikan dan perbaharuan data. Serta dukungan sinkronasi database dengan sistem Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) milik

BKN Pusat semakin menguatkan posisi SIPO sebagai pusat database kepegawaian di Kabupaten Tulungagung.”

Sehingga dari pernyataan diatas yang menyatakan bahwa implemmentasi program SIPO dalam mewujudkan e-government mendapat dukungan dari para stakeholder khususnya pemerintah. Dukungan, kerjasama dan kesadaran juga mengalir dari seluruh PNS Kabupaten Tulungagung khususnya operator SIPO. Dimana seluruh operator SIPO yang tersebar disetiap OPD sangat antusias untuk terus mengikuti perkembangan dari SIPO. Karena operator SIPO sangat merasakan keuntungan dari program ini yang sangat membantu dalam pengolahan data pegawai dan layanan kepegawaian di instansinya.

4) Dana

Dana merupakan suatu hal yang penting dalam keberhasilan sebuah program. Tanpa adanya dukungan dana program tidak akan berhasil dan berjalan dengan baik. Dukungan dana APBD untuk proyek-proyek kegiatan pengembangan sistem informasi di masing-masing unit kerja baik digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan maupun untuk perawatan software SIPO khususnya di BKD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ivan selaku operator SIPO di BKD pada tanggal 11 Juli 2017 di kantor BKD yaitu :

“Pelaksanaan program SIPO ini juga didukung oleh Dana yang berasal dari APBD. Anggarannya sudah tersedia dari sana jadi tidak perlu khawatir lagi dengan dana untuk program ini hanya saja APBD semakin membengkak karena digunakan untuk membiayai perawatan software SIPO.”

Pemerintah terus mendukung untuk mewujudkan *e-Government* di Kabupaten Tulungagung khususnya program SIPO ini demi kemajuan

Kabupaten Tulungagung sendiri dan juga untuk kesejahteraan para PNS Kabupaten Tulungagung dalam menyelesaikan tugas dalam pengolahan data maupun kepengurusan kepegawaian.

b. Faktor Penghambat

1. Minimnya jumlah tenaga ahli

Menjalankan sistem kepegawaian berbasis online ini membutuhkan tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efisien dan efektif yaitu tenaga ahli yang bisa merawat komputer dan mengembangkan sistem informasi (administrator dan programmer). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ivan selaku operator SIPO di BKD pada tanggal 11 Juli 2017 di kantor BKD yaitu :

“salah satu yang menjadi kendala program ini yaitu kurangnya jumlah SDM operator SIPO masing-masing OPD untuk menunjang kelancaran program ini. Tapi tenaga ahli yang bisa dijadikan untuk operator sangat terbatas dimasing-masing OPD.”

Saat ini masih dirasakan bahwa jumlah tenaga ahli yang bisa mengoperasikan program SIPO (operator SIPO) masih minim. Sedangkan ada beberapa OPD yang jumlah pegawainya sangat banyak dan secara otomatis membutuhkan operator SIPO lebih dari satu.

2. Minimnya infrastruktur

Infrastruktur merupakan fasilitas yang menunjang keberhasilan sebuah program. Untuk mencapai tujuan yang akan dicapai maka jumlah infrastruktur juga harus memadai dan mendukung. Dalam implementasi program SIPO ini masih ada kendala lain yaitu kurangnya infrastruktur terutama infrastruktur jaringan dan server. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Bapak Toni Hartanto selaku operator SIPO di KPU pada tanggal 11 Juli 2017 di kantor BKD yaitu :

“Dalam Implementasi program ini yang menghambat pelaksanaan program SIPO saat ini ya koneksi internetnya mbak. Jadi kita kadang lama jika mau memproses data karena itu tadi internetnya tidak bisa lancar.”

Hal serupa juga dikatakan saat wawancara dengan Bapak Zenselaku sekretaris BKD pada tanggal 12 Juni 2017 di kantor BKD yaitu :

“Pengaruhnya yaitu jaringan internetnya kurang mendukung apalagi untuk wilayah atau daerah terpencil yang ada di Kabupaten Tulungagung tidak bisa menjangkau. Untuk itu perlu dibenahi lagi khususnya jaringan internet demi kelancaran pelaksanaan program SIPO ini.”

Dalam pelaksanaan program SIPO ini juga belum adanya infrastruktur jaringan komputer internal yang menghubungkan antar instansi di pemerintah Kabupaten Tulungagung.

3. Kurangnya Pengelolaan Arsip Kepegawaian

Setiap pegawai di suatu instansi pasti memiliki sebuah dokumen pada saat bekerja di instansi masing-masing. Arsip atau dokumen kepegawaian merupakan bukti fisik yang sangat penting. Arsip dianggap sebagai salah satu sumber informasi manajemen kepegawaian. Untuk itu pengelolaan arsip harus tertata dengan baik demi menciptakan pengurusan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Yang menjadi kendala lainnya dalam pelaksanaan program SIPO yaitu arsip yang belum terkelola dan tertata dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lutfi selaku kepala sub bidang pengolahan data BKD pada tanggal 12 Juni 2017 di kantor BKD yaitu :

“Data arsip kepegawaian dalam bentuk fisik belum tertata dengan baik sehingga mempengaruhi pelayanan informasi kepegawaian dan menyulitkan proses validasi antara data arsip bentuk fisik dengan data elektronik.”

Tidak terkelolanya arsip kepegawaian dalam bentuk fisik dapat menghambat pelaksanaan program SIPO. Hal ini menyebabkan proses pelayanan kepegawaian menjadi lama karena jika membutuhkan validasi sebuah informasi dengan data elektronik harus mencari-cari terlebih dahulu di beberapa berkas yang menumpuk.

4. Manajemen SIPO

Manajemen SIPO ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menuju sistem layanan kepegawaian yang lebih luas dan mencakup semua kebutuhan pegawai sehingga sampai saat ini masih dilakukan pembenahan dibidang manajemen dalam program SIPO ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lutfi selaku kepala sub bidang pengolahan data BKD pada tanggal 12 Juni 2017 di kantor BKD yaitu :

“kendala pelaksanaan SIPO selama ini juga dalam bidang manajemennya. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan pihak manajemen maupun pengambil kebijakan dalam mengelola dan melaksanakan program TI serta kurangnya koordinasi antar bidang kerja terutama dalam hal pengembangan sistem informasi maupun pertukaran data.”

Kendala dalam bidang manajemen diatas menyebabkan pelaksanaan program ini kurang maksimal karena masih adanya tumpang tindih kinerja antar bidang kerja. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan data dan layanan pegawai yang lebih luas kurang maksimal.

C. Analisis Data

1. Implementasi Program Sistem ogramInformasi Pegawai *Online* (SIPO) dalam mewujudkan *e-Government* di Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung

Implementasi sebuah program harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan serta harus sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi demi tercapainya tujuan yang lebih baik. Seperti tujuan program SIPO ini yaitu memberi layanan kepegawaian yang lebih baik dan lebih cepat berbasis sistem aplikasi online serta memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam pengambilan keputusan dibidang manajemen kepegawaian. Sehingga dalam proses implementasi program SIPO seperti yang diungkapkan oleh Jones dalam Usman (2002:28) didukung oleh tiga pilar aktivitas dalam proses implementasi program antara lain :

a. Pengorganisasian

Organisasi adalah sebuah alat yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan tertentu dalam mencapai suatu tujuan bersama yang akan dicapai. Dimana keberhasilannya ditentukan oleh elemen-elemen seperti sumberdaya anggaran, sumberdaya manusia, dan sumberdaya peralatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Edward III (1980) dalam Widodo peranan penting dalam implementasi kebijakan atau program, sumberdaya sebagaimana yang telah disebutkan antara lain sumberdaya anggaran, sumberdaya manusia dan sumberdaya peralatan. Jadi sumberdaya tersebut merupakan inti dari suatu organisasi. suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik apabila sumberdaya tersebut memadai dan menunjang apa yang

dibutuhkan dalam organisasi. Edward III dalam Widodo (2011:98) menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimana akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut jika para pelaksana kebijakan atau program yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan atau program kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan atau program tersebut tidak akan berjalan efektif.

Hal tersebut juga telah sesuai dengan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip dalam Subarsono (2005:98-100) bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi suatu kebijakan yakni sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun non manusia (non- human resources). Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan atau program sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III (1980) dalam Widodo (2011:98) menegaskan bahwa *“Probably the most essential resources in implementing policy is staff”* artinya sumberdaya manusia (staff) jumlahnya harus cukup dan mempunyai cakap (keahlian) jadi pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan efektifitas tergantung dengan sumberdaya aparturnya (manusia) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan atau program. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam implementasi program ini tentu saja pemerintah Kabupaten Tulungagung, Pegawai

Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Tulungagung dan *stakeholder*. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Kepegawaian Daerah yang menjadi pelaksana kebijakan atau program pengelolaan data pegawai berbasis online dan mendukung pelaksanaan pengembangan e-government di Kabupaten Tulungagung salah satunya yaitu implementasi SIPO (Sistem Informasi Pegawai Online) serta dengan melaksanakan berbagai pelatihan dalam mewujudkan program SIPO ini. Selain itu Pegawai Negeri Sipil juga berperan penting dalam program ini yaitu ada PNS tertentu yang dijadikan sebagai operator program SIPO di masing-masing OPD lingkup kabupaten Tulungagung dan juga kedudukan PNS sebagai penerima layanan kepegawaian. Oleh karena itu PNS dikatakan berperan penting dalam keberhasilan program ini dengan menunjukkan respon positifnya terhadap program SIPO ini, karena program ini ditujukan untuk para PNS sendiri yang mana berkedudukan sebagai operator program sekaligus penerima layanan dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian yang lebih baik dan lebih cepat dengan berbasis online. PNS Kabupaten Tulungagung sangat merespon program SIPO ini yang sedikit demi sedikit mengalami perkembangan yang lebih baik.

Sesuai dengan George Edward III dalam widodo (2011:98) menyebutkan bahwa sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan atau program. Dalam implementasi kebijakan atau program yang efektif dan efisien sumberdaya manusia harus mengetahui apa yang dilakukan, mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan atau

program, juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, anjuran, dan perintah dari atasan (pimpinan).

Selanjutnya sumberdaya anggaran, sumberdaya anggaran adalah salah satu penunjang yang digunakan dalam pelaksanaan suatu program. Sumberdaya anggaran juga sebagai penunjang yang penting karena suatu program atau kegiatan dapat berjalan secara efektif dengan ditentukan oleh sumberdaya anggaran. Tanpa adanya sumberdaya anggaran suatu program atau kegiatan dalam organisasi sulit untuk digerakkan, karena sumberdaya anggaran dikatakan sebagai penggerak roda dalam organisasi yang didalamnya memuat sumberdaya manusia dan sumberdaya peralatan. Sumberdaya anggaran dapat terorganisir dengan baik apabila ditunjang dengan adanya anggaran yang cukup. Demikian halnya peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai dipengaruhi dari ketersedianya anggaran. Dalam pelaksanaan program SIPO ini, dana berasal dari APBD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa sumber anggaran program SIPO berasal dari APBD Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya dana tersebut kemudian disalurkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung selaku pelaksana program yang akan digunakan untuk menunjang keberlangsungan pelaksanaan program SIPO hingga pengembangan yang sampai saat ini terus dijalankan.

Seperti yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2011:100) bahwa sumberdaya yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan atau program, selain sumberdaya manusia adalah

dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalnya pelaksanaan kebijakan atau program. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan juga terbatas. Jadi dengan adanya dukungan dana yang cukup maka pelaksanaan program ini juga akan berjalan dengan baik.

Kemudian sumberdaya peralatan, sumberdaya peralatan merupakan fasilitas penunjang yang dibutuhkan guna melaksanakan kebijakan atau program yang baik. sumberdaya peralatan merupakan aktor penting dalam implementasi kebijakan karena tanpa adanya peralatan sarana dan prasarana yang mendukung maka implementasi kebijakan atau program tidak akan berhasil. Oleh karena itu, fasilitas yang cukup baik bagi para pelaksana kebijakan sangatlah mendukung bagi pelaksanaan suatu program atau kebijakan publik (Agustino, 2008: 139).

Dalam pelaksanaan program SIPO di BKD Kabupaten Tulungagung, sumberdaya fasilitas/peralatan telah dimiliki oleh pelaksana kebijakan yakni BKD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian, peralatan/fasilitas sarana dan prasarana yang telah tersedia dalam pelaksanaan program SIPO dalam mewujudkan e-government di Kabupaten Tulungagung, yakni fasilitas berupa peralatan dan material ke setiap OPD dan UPTD untuk menunjang program SIPO. Setiap OPD dan UPTD sudah tersedia fasilitas yang memadai seperti jumlah PC, notebook, printer, scanner, server lokal, dan koneksi internet. kemudian ruangan yang tersedia yang digunakan untuk setiap diadakannya sosialisasi pengembangan aplikasi SIPO. fasilitas tersebut digunakan oleh

operator dan admin SIPO di masing-masing OPD dan UPTD. Pada meja setiap operator dan admin SIPO terdapat 1 Komputer atau notebook yang terkoneksi dengan internet, 1 printer. Fasilitas tersebut untuk menunjang administrasi pelayanan yang cepat dan mudah. Jadi fasilitas sarana dan prasarana adalah pendukung dari jalannya pelaksanaan program. Berdasarkan dari keterangan diatas, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III dalam widodo (2011: 102) yang menegaskan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan atau program yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan terhadap implementasi kebijakan atau program. Artinya apabila fasilitas atau sarana dan prasaran yang tersedia dalam suatu implementasi kebijakan atau program lengkap maka jalannya program tersebut juga akan baik, begitu juga sebaliknya apabila persediaan fasilitas minim tentunya program menjadi kurang maksimal dan terhambat.

b. Interpretasi

Dalam implementasi sebuah kebijakan atau program harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya. Menurut Jones dalam Hessek Nogi (2003:30) bahwa proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Pelaksana program disini adalah BKD dan Pegawai

Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai *user* atau operator dan admin SIPO di bidang Informasi Kepegawaian. Mereka sangat antusias dengan adanya program SIPO ini dapat dilihat dari banyaknya *user* yang hadir pada sosialisasi mengenai program SIPO dan mereka terus belajar perlahan-lahan untuk mengikuti perkembangan SIPO yang sampai saat ini terus berupaya memperbaiki dan mengembangkan aplikasi SIPO menjadi sistem yang lebih luas yaitu bisa mencakup semua kebutuhan PNS dalam melakukan administrasi pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat. Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa juga adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara para admin SIPO di BKD dengan para operator di semua OPD dan UPTD Kabupaten Tulungagung. Para *user* mendapatkan keuntungan dari adanya program SIPO yakni mempermudah dalam pengolahan data pegawai seperti proses pengurusan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, dll. Dengan adanya banyak manfaat para operator dan admin SIPO semakin antusias sehingga adanya kemauan untuk terus mempelajari aplikasi SIPO yang saat ini terus berkembang menjadi aplikasi yang lebih baik, mudah serta lebih lengkap sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan program SIPO yang sampai saat ini terus dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah merupakan tuntutan dan kebutuhan para PNS yang lebih luas dan terintegrasi dalam mewujudkan *e-Government* di Kabupaten Tulungagung. Dengan menu dan fitur-fitur khusus didalamnya yang terus bertambah. Adanya program SIPO para operator dan admin selaku pengolah data pegawai di masing-masing OPD dan UPTD lingkup Kabupaten Tulungagung yang nantinya terus berharap

bahwa program SIPO tersebut mampu membantu memudahkan para operator dalam mengolah data kepegawaian dan seluruh layanan administrasi berbasis online di instansi-instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pelaksanaan program SIPO ini dalam memilih operator sesuai dengan potensi yang dimiliki yaitu ahli dalam bidang Informasi dan Teknologi dan berkedudukan sebagai pengolah data pegawai di OPD dan UPTD masing-masing sehingga sangat membantu proses pengolahan data yang setiap triwulan harus dikirim pada admin SIPO di BKD Kabupaten Tulungagung. SIPO tersebut juga diharapkan mampu menjadikan proses administrasi kepegawaian dan sistem informasi secara online yang lebih lengkap sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan terkait recruitment pegawai, penempatan pegawai yang sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya, pengembangan pegawai, serta kesejahteraan pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka strategi yang digunakan dalam menerapkan *e-Government* dalam menyediakan informasi dan meningkatkan pelayanan pegawai melalui SIPO dan KMS yaitu dengan menetapkan Suprastruktur (kebijakan) yang menjadi dasar penerapan *e-Government* pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Untuk mengantisipasi perkembangan jaman dan meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien serta mewujudkan pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai *good governance*. Pada tahap pertama telah dilakukan survey kebutuhan dan kesiapan infrastruktur serta sumber daya manusia yang ada di instansi

dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan kebijakan atas pelayanan pegawai melalui e-KM tersebut maka BKD menyusun Rencana Induk (modul) sebagai tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya. Pada tahun 2015 BKD Kabupaten Tulungagung telah membuat buku panduan pengoperasian SIPO, akan tetapi dirasa dokumen tersebut belum efektif dalam membantu *user* di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, penyusunan modul Kebijakan *e-Government* ini dilaksanakan kembali pada tahun 2017 oleh BKD Kabupaten Tulungagung. Dimaksudkan dapat digunakan sebagai kerangka acuan penerapan program SIPO dalam upaya mengembangkan *e-Government* di Pemerintah Kabupaten Tulungagung serta upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun ruang lingkup pengembangan dalam Dokumen Kebijakan *e-Government* Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Tulungagung ini terdiri dari 5 (lima) komponen pengembangan yaitu: kebijakan, kelembagaan, aplikasi, infrastruktur dan perencanaan.

Kondisi ini sesuai dengan teori menurut Indrajit (2006:2): "*E-government* berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *wide areanetwork*, *internet*, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang

beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien.

Penyusunan modul pengoperasian program SIPO BKD Kabupaten Tulungagung ini dapat memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi pengembangan SIPO yang komprehensif, efisien, efektif dan terpadu menuju *Good Corporate Governance* dan tetap berada dalam kerangka dan bagian dari penerapan TIK di lingkungan Kabupaten Tulungagung. SIPO dalam upaya membeirkan informasi secara benar terkait dengan keberadaan para pegawai dan infromasi klasifikasi terkait dengan kemampuan dasar serta pendidikan yang dimiliki. Hasil yang diharapkan dengan adanya dokumen modul pengoperasian SIPO dalam mewujudkan *e-Government* di Kabupaten Tulungagung ini adalah:

- a. Terciptanya langkah-langkah yang sinergis dan sistematis dalam pengembangan TIK khususnya pengembangan program SIPO sebagai upaya untuk menciptakan *e-Government* guna menjadi dasar penyusunan kegiatan dan penganggaran bidang TIK di Kabupaten Tulungagung
- b. Terdefinisikannya sebuah rencana TIK stratejik yang dapat digunakan untuk mengontrol dan mengarahkan seluruh sumber daya TI sehingga sesuai dengan strategi bisnis serta prioritasnya dengan mamaksimalkan peran dari pegawai dalam upaya memaksimalkan pelayanan dan

dukungan atas penetapan klasifikasi terkait dengan sumber daya manusia yang terdapat diinstansi.

c. Tersedianya acuan untuk melaksanakan aktivitas di bidang pengembangan pegawai dan penerapan TIK yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Tulungagung saat ini dan tahun kedepan. Sedangkan tujuan pekerjaan penyusunan modul pengoperasian program SIPO dalam upaya mewujudkan *e-Government* adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin keterpaduan sistem pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam rangka membuka akses kepada informasi dan layanan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang transparan. Langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan peningkatan kinerja pegawai.
2. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Terciptanya kegiatan penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif sehingga menghasilkan sebuah layanan prima.
4. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, *budgeting* dan proses kerja pemerintahan. Sedangkan sasarannya adalah :
 - a. Tersusunnya review terhadap berbagai rencana dan kebijakan terkait *e-government*
 - b. ataupun teknologi informasi yang telah disusun.

- c. Teridentifikasinya kondisi eksisting terkait *e-government* di BKD Kabupaten Tulungagung dan merumuskan kebutuhannya atas keberadaan SDM instansi.
- d. Terumuskannya rencana pengembangan *e-government* melalui program SIPO di BKD Kabupaten Tulungagung meliputi kerangka pemikiran dasar, pengembangan, tahapan pengembangan, dan rencana implementasi sumber daya manusia di instansi.

Berdasarkan strategi yang ditetapkan tersebut maka berbagai upaya dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa penerapan *e-Government* di BKD Kabupaten Tulungagung dapat berjalan secara maksimal. Hal ini didukung oleh teori yang kemukakan oleh Siagian (2004:10) menyatakan bahwa pengertian strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Strategi ini dilakukan untuk memberikan dukungan bahwa seluruh kebijakan terkait dengan *e-Government* dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian melalui program SIPO dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi program SIPO di BKD Kabupaten Tulungagung banyak memberikan dukungan dalam upaya meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian dan mempengaruhi pengambilan keputusan di bidang manajemen kepegawaian, yaitu dengan menciptakan *e-Government* melalui program SIPO

yang bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu *SIPO* ini juga bertujuan untuk mendukung *good governance*. Penggunaan teknologi yang mempermudah untuk mengakses informasi dapat mengurangi penyimpangan terkait dengan pengelolaan sumber daya instansi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

Dalam menu *SIPO* terdapat fitur e-KMS yaitu fitur konsultasi, masukan, dan saran berbasis online yang ditujukan untuk BKD dari para PNS di Kabupaten Tulungagung. Menurut teori yang dikatakan oleh Barlow & Moller (1996) e-complaint adalah penyampaian komplain dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti website. Sebuah komplain disampaikan oleh seseorang untuk mengkomunikasikan sesuatu yang negatif terhadap produk atau pelayanan yang dibuat atau dipasarkan. Pernyataan ini memberikan gambaran mengenai pentingnya *e-Government* dalam upaya memberikan jaminan kepuasan atas pelayanan yang diberikan kepada pegawai maupun masyarakat.

E-Government pada dasarnya merupakan suatu mekanisme interaksi baru (*modern*) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*); dimana Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan dan menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-

Government melalui program SIPO di BKDKabupaten Tulungagung secara umum antara lain:

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*.
- b. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
- c. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada
- e. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis, yaitu dengan meminimalkan permasalahan yang terjadi.

E-Government juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Teori Akadun (2009:132-133) Adapun relasi dari *e-Government* dengan

penjelasan bahwa peningkatan kinerja dan kesejahteraan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di sejumlah institusi yaitu relasi antarpemerintah dan employee (*G2E-government to employee*). Penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum merupakan tujuan dalam upaya pelaksanaan *e-Government*. Seperti pada penerapan program Implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai *Online* (SIPO) dalam mewujudkan *e-Government* di Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung dapat diketahui dari berbagai upaya yang terus dikembangkan oleh BKD dalam pelaksanaan program SIPO. Tetapi pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa program SIPO yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Tulungagung belum memenuhi kriteria atas pelayanan secara maksimal. Kondisi ini menjadikan aktivitas pelaksanaan *e-Government* belum memberikan dukungan secara maksimal dalam upaya menciptakan kepuasan dalam memberi layanan kepegawaian. Tujuan pelaksanaan *e-government* menurut Junaidi (2005 : 444) adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan efisiensi pemerintah, 2) Memberikan berbagai layanan kepada masyarakat secara lebih baik 3) Memberikan akses informasi kepada publik secara luas dan 4) Menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat.

Jadi dapat dikatakan bahwa program SIPO merupakan suatu media yang digunakan oleh Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung dalam memberikan informasi terkait dengan data pegawai sehingga mendukung proses pengelolaan sumber daya instansi dan mendukung

dalam memaksimalkan penggunaan fasilitas atau pelayanan kepegawaian. Pelaksana dari program SIPO yaitu BKD dan *user* dari beberapa OPD di Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dalam mengoperasikan program SIPO, BKD melakukan Bimtek dan sosialisasi kepada semua *users* serta pembuatan modul pengoperasian SIPO yang dibagikan kepada para *user* sehingga pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

c. Penerapan/Aplikasi

Proses implementasi Program Sistem Informasi Pegawai *Online* (SIPO) dalam mewujudkan *e-Government* di Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung telah melibatkan unsur-unsur yang terkait, dimana bagian-bagian ini memiliki tugas dan peran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penerapan *e-Government* di BKD Kabupaten Tulungagung dilakukan untuk memberikan pelayanan kepegawaian dan pengolahan data pegawai yang mana SIPO mempunyai peran dan fungsi strategis dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen kepegawaian. Sehingga implementasi program SIPO dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Adanya aktor dalam pelaksanaan *e-Government* dengan menggunakan program SIPO di BKD secara langsung dapat mempermudah proses pengawasan yang dilakukan sehingga memberikan jaminan atas dukungan dalam proses peningkatan pelayanan kepada pegawai dan pengolahan data kepegawaian.

Menurut Al Gore dan Tony Blair dalam Indrajit (2002:5) telah secara jelas terperinci menggambarkan manfaat yang di peroleh dengan

menerapkan konsep program SIPO dalam mewujudkan *electronic government* bagi suatu negara, antara lain yaitu:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan organisasi pada masa yang akan datang.
2. Meningkatkan transparansi kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktifitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat cepat menjawab berbagai perubahan global dan tren yang ada.
6. Memberdayakan SDM dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Beberapa manfaat yang diberikan penggunaan program SIPO memiliki peran yang penting terkait dengan jaminan atas peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian, pengolahan data dan pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian juga tepat sasaran dengan menghasilkan SDM di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang

berkualitas dan kompeten. Jaminan dalam rangka peningkatan manfaat tersebut dilakukan maka segala bentuk prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan sehingga segala bentuk permasalahan yang terjadi dapat dimimalkan atau dihilangkan.

2. Faktor penghambat dan pendukung Implementasi Program Sistem Informasi Pegawai *Online* (SIPO) dalam mewujudkan *e-Government* di Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung.

Upaya yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Tulungagung dalam upaya memaksimalkan Program Sistem Informasi Pegawai *Online* (SIPO) maka terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendukung pelaksanaan *e-Government*. Faktor penghambat dan pendukung Implementasi Program Sistem Informasi Pegawai *Online* (SIPO) dalam mewujudkan *e-Government* di Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor pendukung Implementasi Program Sistem Informasi Pegawai *Online* (SIPO) dalam mewujudkan *e-Government* di Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung

Pelaksanaan Sistem Informasi Pegawai *Online* (SIPO) di BKD Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa faktor pendukung, dimana faktor tersebut terkait dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Keseriusan Pemerintah Daerah dalam pengembangan *e-Government* melalui Sistem Informasi Pegawai *Online* (SIPO). Faktor pendukung implementasi program SIPO antara lain, jumlah perangkat keras yang memadai, adanya bidang khusus yang menangani yaitu bidang Informasi kepegawaian di

BKD, adanya dukungan para stakeholder dan dukungan dana dari Pemerintah Daerah Tulungagung. Faktor tersebut seperti yang diungkapkan oleh Edward III dalam Widodo (2009:96-107) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan implementasi program yaitu : faktor komunikasi; sumberdaya meliputi sumberdaya manusia, anggaran, dan peralatan; disposisi; dan struktur birokrasi.

Faktor tersebut menjadi pendukung karena adanya jaminan kepastian hukum atau perundangan sehingga seluruh aktivitas pelaksanaan *e-Government* melalui Program Sistem Informasi Pegawai *Online* (SIPO) memiliki kekuatan secara hukum. Pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung strategi kebijakan yang dilakukan yaitu bentuk dukungan tersebut menjadikan segala bentuk kebijakan yang akan ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Fasilitas tersebut juga memberikan dampak terhadap ketersediaan informasi yang benar-benar sesuai sehingga mampu menjangkau seluruh aktivitas yang dilakukan instansi dalam memberikan pelayanan.

b. Faktor penghambat Implementasi Program Sistem Informasi Pegawai *Online* (SIPO) dalam mewujudkan *e-Government* di Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung

Faktor penghambat merupakan faktor yang menjadikan atau menjadi penyebab pelaksanaan Sistem Informasi Pegawai *Online* (SIPO) tidak secara maksimal dalam memberikan pelayanan. Menurut peneliti, yang menjadi penghambat dalam implementasi program SIPO apabila ditinjau

kendala aplikasi juga menjadi hal yang menghambat pelaksanaan *e-Government* melalui Sistem Informasi Pegawai *Online* (SIPO) di BKD Kabupaten Tulungagung, dimana kondisi aplikasi masih secara parsial. Kondisi ini menjadikan data/informasi belum terintegrasi secara maksimal dan sampai saat ini juga belum adanya prosedur standar penanganan data.

Apabila dikaitkan dengan penggunaan perangkat keras dan jaringan menunjukkan bahwa selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana komputer beserta jaringannya di lingkungan Pemda, infrastruktur serta akses Internet yang lambat. Apabila faktor penghambat dikaitkan dengan Sumber Daya Manusia yaitu adanya keterbatasan jumlah (programmer) dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi penguasaan TIK yang cukup baik dan terbatasnya kemampuan dan kesiapan SDM dalam tata kelola TIK di lingkungan pemerintah. Faktor penghambat diatas seperti yang diungkapkan oleh Sunggono (1994:149-153) implementasi program mempunyai beberapa penghambat antara lain :

- a. Isi kebijakan
- b. Informasi
- c. Dukungan
- d. Pembagian potensi

Sedangkan menurut Hasibuan (2007:70) selain adanya usulan-usulan untuk kemajuan dan pengembangan *e-Government* di Indonesia, *e-Government* juga menghadapi berbagai macam kendala antara lain:

- a. Masih rendahnya kesadaran (*awareness*) dalam mengambil keputusan telematika
- b. Langkanya SDM yang berkualitas
- c. Masih minimnya infrastruktur telekomunikasi
- d. Tarif internet yang masih mahal serta kurang memadai
- e. Penetrasi PC yang masih rendah

Beberapa kendala tersebut menjadikan pelayanan melalui *e-Government* tidak dapat secara maksimal dijalankan